

**KONFLIK TAMBANG GALIAN C SUNGAI BILA DI KECAMATAN
PITU RIASE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

TESIS

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Magister

Pada Program Studi Ilmu Politik



HARUN DACHRI

E052191016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harun Dachri

Nomor Induk Mahasiswa : E052191016

Program Studi : (S2) Ilmu Politik

Menyatakan dengan ini bahwa tesis yang berjudul "Konflik Tambang Galian C Sungai Bila Di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 3 Agustus 2023

Yang menyatakan



Harun Dachri

E052191016

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**KONFLIK TAMBANG GALIAN C
SUNGAI BILA DI KECAMATAN PITU RIASE,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Disusun dan diajukan oleh

HARUN DACHRI

E052191016

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal **09 Agustus 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Muhammad, M.Si
Nip. 19710917 199703 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si
Nip. 19730813 199803 2 001

Ketua Program Studi
Ilmu Politik ,



Dr. Ariana, S.IP., M.Si
Nip. 19710705 199803 2 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
Nip. 197508182008011008

ABSTRAK

HARUN DACHRI. *Konflik Tambang Galian C Sungai Bila Di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang* (dibimbing oleh Muhammad dan Gustiana)

Aktivitas tambang pasir dan batuan yang tidak terkendali menuai penolakan masyarakat. Kerusakan lingkungan dan aktivitas tambang ilegal merupakan penyebab konflik yang terjadi antara masyarakat dan penambang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik yang terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan galian C di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bertipe deskriptif analitik yang menggunakan teori konflik sosial dan dikolaborasikan dengan pendekatan ekologi politik untuk memahami konflik yang berada pada ranah pengelolaan sumber daya alam. Konflik yang berlarut – larut tanpa ada penyelesaian, membuktikan bahwa konflik pengelolaan sumber daya alam tersebut sangat dipengaruhi oleh aspek politik, sosial, dan ekonomi, sebagai faktor penyebab dan faktor yang memperpanjang terjadinya konflik. Masalah perizinan, kebijakan, dan perilaku pemerintah, serta lemahnya penegakan hukum menjadi faktor memperpanjang dan menghambat penyelesaian konflik yang terjadi akibat adanya aktivitas tambang galian C di Sungai Bila.

Kata kunci: Konflik, Ekologi Politik, Tambang Galian C



ABSTRACT

HARUN DACHRI. *Quarry Conflict C Sungai Bila, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency* (supervised by Muhammad and Gustiana)

Uncontrolled sand and rock mining activities have led to community rejection. Environmental damage and illegal mining activities are the causes of conflicts that occur between communities and miners. This research aims to analyze the conflicts that occur due to the existence of C excavation mining activities in Sungai Bila, Pitu Riase District, Sidenreng Rappang Regency. This research is a descriptive-analytic type qualitative research that uses social conflict theory and is collaborated with a political ecology approach to understand conflicts that are in the realm of natural resource management. Conflicts that drag on without resolution prove that natural resource management conflicts are strongly influenced by political, social and economic aspects, as causal factors and factors that prolong conflicts. Licensing issues, policies, and government behavior, as well as weak law enforcement are factors that prolong and hinder the resolution of conflicts that occur due to the existence of C excavation mining activities in the Bila River.

Keywords: Conflict, Political Ecology, Rock mining



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul yang penulis ajukan **“Konflik Tambang Galian C Sungai Bila di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang”**

Penyusunan tesis yang penulis lakukan telah disadarinya bahwa sebagai penulis awam yang baru saja menuangkan pikiran ke dalam bentuk tulisan sepertidemikian adanya ini pastilah akan masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna meningkatkan kemampuan penulis yang akan berdampak berlangsung pada proses penyempurnaan penulisan selanjutnya :

1. Seluruh keluarga besar penulis. Kedua orang tua penulis, Alm. Dachri Dato dan Rumani Husain. Kakak dari penulis Adriani Dachri, Rivai Dachri, Azizah Dachri dan Abd. Razak Dachri, Hasanuddin La Bintang, Syahyadi, Anhy Asfar, Anugerah Yanti. Serta adik penulis Altaf, Aqil, Konita, Auni

dan Aufa. Terimakasih karena telah menghadirkan rumah yang selalu penulis rindukan untuk kembali pulang.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Ibu Dr. Ariana Yunus, S.IP. selaku ketua Prodi S2 Ilmu Politik.
5. Bapak selaku pembimbing I, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si., yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.I.P., M.Si selaku penasehat pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini,
7. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Dr. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. Dr. Ariana Yunus, S.IP. M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Umni Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran,S.IP, M.Si Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan iv dengan sebaik mungkin. 6. Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak, Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si, Muh. Imran,S.IP, M.Si., Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D atas waktu dan kesiapanya memberikan masukan kepada penulis demi kebaikan dan penyempurnaan tulisan ini.
8. Seluruh Staf khususnya Departemen Ilmu Politik, serta staf administrasi Pascasarjana di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.

9. Kepada teman – teman seperjuangan pasca ilmu politik unhas Cenne, Raihan, Naje, Fikar, Yusril, Hidayat, Syahrir, Sri, Wil, Nining, Besse, Eko dan Wardah terimakasih telah kebersamai penulis selama ini dalam mengarungi Samudra Pendidikan di prodi ilmu politik unhas.
10. Kepada Rahmadi dan Yeyen yang telah sangat membantu dalam proses penelitian dan penyusunan karya tulis ini.
11. Kepada Haerul, Hendra, Onco, Kak Awi, sebagai tim support yang telah sangat luar biasa membantu penulis.
12. Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman - teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 30 Juli 2023

Harun Dachri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	<i>i</i>
ABSTRAK	<i>ii</i>
ABSTRACT	<i>iii</i>
KATA PENGANTAR	<i>iv</i>
DAFTAR ISI	<i>v</i>
DAFTAR TABLE	<i>vi</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>vii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	10
1.3 TUJUAN PENELITIAN	11
1.4 MANFAAT PENELITIAN	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 PENDEKATAN EKOLOGI POLITIK.....	13
2.2 TEORI KONFLIK LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	16
2.3 TEORI KONFLIK	21
2.4 TAMBANG GALIAN C.....	28
2.5 PENELITIAN YANG RELEVAN.....	32
2.6 KERANGKA PEMIKIRAN.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 LOKASI PENELITIAN	41
3.2 TIPE DAN DASAR PENELITIAN	41
3.3 JENIS DATA.....	43
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	43

3.4 TEKNIK PENETAPAN INFORMAN.....	44
3.5 TEKNIK ANALISIS DATA	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI.....	47
4.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PITU RIASE.....	47
4.1.1 KONDISI FISIK	47
5.1.1 KONDISI SOSIAL EKONOMI	49
4.2 SUNGAI BILA DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.....	51
4.3 ALUR PERIZINAN TAMBANG GALIAN C DI SUNGAI BILA.....	56
BAB V PEMBAHASAN.....	60
5.1 PROSES KONFLIK TAMBANG GALIAN C DI SUNGAI BILA.....	60
5.1.1 KRONOLOGI KONFLIK TAMBANG GALIAN C	60
5.1.2 TAHAPAN DAN ESKALASI KONFLIK	73
5.1.3 DAMPAK KONFLIK TAMBANG GALIAN C SUNGAI BILA TERHADAP MASYARAKAT DI KECAMATAN PITU RIASE....	94
5.1.4 UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI KONFLIK TAMBANG GALIAN C DI SUNGAI BILA.....	106
5.2 PEMETAAN KONFLIK TAMBANG GALIAN C DI SUNGAI BILA	111
5.2.1 AKTOR – AKTOR KONFLIK TAMBANG GALIAN C DI SUNGAI BILA	111
5.2.2 PEMETAAN DAN HUBUNGAN ANTAR AKTOR.....	119
5.2.3 PENYEBAB KONFLIK TAMBANG GALIAN C DI SUNGAI BILA.....	136
5.2.4 POKOK MASALAH KONFLIK TAMBANG GALIAN C DI SUNGAI BILA	153
5.2.5 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENYELESAIAN KONFLIK TAMBANG GALIAN C DI SUNGAI BILA.....	160
5.2.6 IMPLIKASI TEORI	170

BAB VI PENUTUP	179
6.1 KESIMPULAN	179
6.2 SARAN	180
DAFTAR PUSTAKA	182

DAFTAR TABLE

Tabel 1.1. Konflik Tambang Galian C di Sulawesi Selatan.....	4
Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian.....	39
Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Presentase Luas Desa/Kelurahan Terhadap Luas Kecamatan Pitu Riase.....	49
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Pitu Riase	50
Tabel 5.1. Kronologi Konflik Tambang Galian C Sungai Bila di Kecamatan Pitu Riase	68
Tabel 5.2. Tahap dan Eskalasi Konflik Tambang Galian C Sungai Bila di Kecamatan Pitu Riase.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1 Skema Kerangka Pikir.....	40
Gambar. 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Pitu Riase.....	48
Gambar. 4.2 Tampak Atas Sungai Bila	53
Gambar 4.3. Alur Perizinan Tambang Galian C di sungai Bila	57
Gambar. 5.1 Aksi Penolakan Tambang Galian C.....	65
Gambar. 5.2 Grafik Tahap dan Eskalasi Konflik Tambang Galian C Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase	74
Gambar. 5.3 Lahan Perkebunan Milik Masyarakat Terisolasi.....	96
Gambar. 5.4 Aksi AMPBS.....	102
Gambar. 5.5 Peta Interaksi Aktor.....	118
Gambar. 5.6 Aktiivtas penambangan di Sempadan Sungai.....	139
Gambar. 5.7 Aktivitas Pengerukan Sirtu di Sempadan Sungai Bila.....	147
Gambar. 5.8 Wilayah Tambang Berdasarkan IUP Operasi Produksi....	152

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sumber daya alam menjadi isu yang sangat paradoks dalam konteks pembangunan. Bukan hanya bagaimana cara mengelola, keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam ataupun kelestariannya, namun juga mengenai dampak sosial yang muncul dari pengelolaan tersebut. Pengelolaan sumber daya alam sejatinya diharapkan menjadi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pada suatu negara. Namun di sisi yang lain, pengelolaan sumber daya alam sering kali menjadi penyebab ataupun sebagai arena terjadinya suatu konflik. Konflik akan sangat rentan terjadi apabila adanya eksploitasi sumber daya alam dari pihak tertentu, persilangan kepentingan kadang kala memuncak hingga melahirkan perselisihan, seperti halnya yang sering terjadi dalam aktifitas pertambangan di Indonesia.

Konflik pertambangan terjadi pada tahun 2020 - 2021 di Indonesia sebanyak 45 kasus. Jumlah ini meningkat hampir lima kali lipat jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2019, yakni 11 konflik. Adapun klasifikasi konflik yang terjadi sepanjang tahun 2020 itu, antara lain pencemaran dan perusakan lingkungan (22 kasus), perampasan lahan (13 kasus), kriminalisasi warga penolak tambang (8 kasus), dan pemutusan

hubungan kerja (2 kasus).¹ Seperti yang terjadi pada konflik masyarakat nelayan Kepulauan Sangkarang, Kodingareng, Sulawesi Selatan melawan rencana reklamasi Makassar *New Port*, Pelindo dan konflik masyarakat nelayan menolak tambang timah PT. Timah di Bangka Barat, Bangka Belitung. Konflik pertambangan di Indonesia terjadi bukan hanya karena adanya pola kriminalisasi dan marginalisasi terhadap masyarakat setempat, namun yang jauh lebih penting bahwa adanya kesadaran akan rusaknya lingkungan yang mengancam seluruh kehidupan di daerah tambang tersebut.²

Pertambangan yang sangat berpotensi untuk melahirkan konflik adalah tambang galian C. Terminologi bahan galian C sebelumnya diatur dalam Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 1967 yang kemudian diubah ke dalam UU No 4 Tahun 2009. Tambang galian C masuk dalam kategori pertambangan mineral, lebih sederhananya merupakan bahan tambang yang lumrah digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa pasir kali, batu pecah, kaolin, marmer, dan lain sebagainya. Secara klasifikasinya, bahan tambang galian C tidak tergolong sesuatu yang strategis dan vital bagi negara sebagaimana bahan galian A dan B.³

Pengklasifikasian tingkat urginitas tersebut, sehingga wajar jika adanya anggapan tentang kurangnya perhatian pemerintah terhadap

¹ <https://nasional.tempo.co/read/1426234/jatam-nasional-catat-ada-45-konflik-tambang-sepanjang-2020>

² <https://www.walhi.or.id/data-konflik-tambang>

³ UU No 4 Tahun 2009

aktifitas tambang galian C. Hal ini tentu menjadi sangat riskan, sebab bahan tambang galian C telah menjadi arena dari banyak kepentingan. Mengingat kekayaan bahan tambang galian C yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta tingginya permintaan bahan-bahan hasil tambang tersebut untuk keperluan konstruksi bangunan dan jalan.

Tambang galian C di era otonomi daerah juga mempunyai problematika tersendiri. Dengan maksud untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat, pemerintah daerah tidak jarang melonggarkan perizinan dan pengawasan untuk memudahkan pemilik modal dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya. Lemahnya pengawasan oleh pemerintah memberi peluang bagi pemilik modal lainnya untuk melakukan kecurangan, baik dari sisi legalitas ataupun eksploitasi sumber daya alam. Maraknya aktifitas pertambangan liar, penyerobotan tanah milik warga, serta rusaknya lingkungan menjadi penyebab konflik yang berakar dari inkonsistensi sikap pemerintah dalam menentukan posisi keberpihakannya.⁴

Konflik tambang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Konflik yang disebabkan oleh aktivitas tambang galian C hampir terjadi di seluruh wilayah. Terhitung sejak tahun 2018 hingga 2022, konflik didominasi oleh para penambang dengan masyarakat, faktor degradasi lingkungan, pertambangan ilegal, penyerobotan lahan milik masyarakat, serta

⁴ Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, 2013. cet. ke-1 hal.1.

berkurangnya pendapatan masyarakat menjadi corak penyebab yang sering ditemui dari aktivitas tambang galian C di Sulawesi Selatan. Berikut beberapa kasus konflik tambang galian C di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2018-2022 :

Tabel 1.1. Konflik Tambang Galian C di Sulawesi Selatan

No	Lokasi	Deskripsi
1	Desa Garessi, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru	Warga menghadang kendaraan penambang karena kerusakan lingkungan, infrastruktur jalan (jalan desa) dan drainase. Pengusaha melawan keputusan dan terus melakukan aktifitas yang telah dilarang oleh pemerintah.
2	Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar	Aktifitas tambang ilegal batu gunung, batu gajah, dan tanah timbunan yang melakukan penyerobotan lahan seluas 20 m ² dan 10.185 m ² milik masyarakat telah dilaporkan ke pihak berwajib. Aktifitas tambang ini merusak lokasi di daerah resapan air.
3	Desa Salipo, Kec. Cempa, Kab. Pinrang	Intimidasi yang dilakukan kepada pengujukrasa penolakan tambang pasir oleh PT. Alam Sumber Rezeki di bantaran Sungai Saddang yang diduga berasal dari oknum aparat. Penolakan dikarenakan aktifitas tambang dilakukan secara ilegal di lahan seluas 182 hektare yang bukan menjadi Zona Tambang Kab. Pinrang.
4	Kepulauan Sangkarrang, Kec. Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar	Konflik antara masyarakat nelayan Kepulauan Sangkarrang dengan PT. Royal Boskalis dan PT Benteng Laut Indonesia. Aktifitas tambang yang tidak dilakukan secara benar sesuai hukum, menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan membuat

		hasil tangkapan nelayan menurun drastis. Masyarakat melakukan protes dan unjuk rasa dengan menghadang kapal pemilik tambang, yang kemudian perusahaan melakukan kriminalisasi.
5	Desa Sampulungan, Kec. Kec. Galesong Utara. Kabupaten Takalar.	Aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) beserta warga Galesong menyuarkan kepada pemerintah untuk menghentikan tambang pasir di Galesong Takalar untuk keperluan reklamasi sepanjang Pesisir Makassar. Pertambangan pasir laut menyebabkan abrasi di Pesisir Galesong sekitar 2-10 meter yang menyebabkan rusaknya rumah warga dan kerusakan pada pemakaman umum.

Sumber data : diolah dari berbagai sumber

Konflik akibat adanya tambang galian C juga terjadi di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Konflik ini terjadi secara berlarut – larut sejak tahun 2014 hingga 2023 yang melibatkan masyarakat dan penambang. Konflik bermula karena adanya penolakan masyarakat terhadap aktivitas tambang yang menyebabkan kerusakan di Sungai Bila serta adanya dugaan penambangan ilegal dari penambang. Besarnya konflik melibatkan pula kehadiran pemerintah baik pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta Walhi (Wahana Lingkungan Indonesia) Provinsi Sulawesi Selatan.⁵

⁵ <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

Konflik mulai terjadi di tahun 2014, ketika warga Desa Bila Riase berbondong–bondong mengadukan aktivitas tambang ke Kepala Desa Bila Riase, Camat Pitu Riase hingga ke pihak Kepolisian Pitu Riase terkait dugaan adanya penyerebotan tanah milik masyarakat yang dilakukan oleh para penambang. Pertentangan semakin memanas ketika beberapa pemilik tambang tidak dapat menunjukkan izin usaha yang sudah jatuh tempo, sehingga semakin menguatkan kecurigaan masyarakat bahwa aktivitas tambang dilakukan secara illegal.⁶

Penolakan masyarakat, mendapat respon dari pemerintah setempat. Pada tanggal 4 September 2018, Bupati Sidenreng Rappang mengeluarkan sanksi kepada empat penambang yang terdiri UD Ahmad, UD Shinta Pratama, CV Ega, CV Bill Boy Abadi 775. Sanksi tersebut berisi tentang tindakan pemerintah untuk secara paksa memberhentikan aktivitas penambangannya sampai kewajiban terhadap reklamasi dan pengganti rugi lahan perkebunan masyarakat yang rusak terpenuhi oleh para penambang. Adanya sanksi dari pemerintah tersebut membuat aktivitas tambang di Sungai Bila berhenti hingga pertengahan tahun 2020.⁷

Konflik yang sempat mereda, kembali memanas akibat UD Ahmad, UD Shinta Pratama, CV Ega, CV Bill Boy Abadi 775 melakukan kembali aktivitasnya tanpa menyelesaikan kewajiban reklamasi atau pemulihan kawasan yang rusak di Sungai Bila. Masyarakat menuding bahwa tindakan

⁶ <https://kabarnusantaranews.com/warga-sidrap-protes-tambang-liar-di-sungai-bila/>

⁷ <https://kabarnusantaranews.com/warga-sidrap-protes-tambang-liar-di-sungai-bila/>

yang dilakukan oleh keempat penambang tersebut telah melanggar kebijakan dari pemerintah daerah yang masih melarang segala aktivitas tambang beroperasi kembali di Sungai Bila.

Aksi-aksi penolakan dilakukan oleh masyarakat berupa demonstrasi, menutup jalan akses ke lokasi tambang, hingga melaporkan aktivitas tersebut ke pihak kepolisian. Puncak konflik antara masyarakat dan penambang terjadi pada tahun 2020 ketika adanya kunjungan dari Wakil Bupati Sidenreng Rappang ke lokasi tambang di Sungai Bila. Persitengangan yang memuncak hampir menciptakan bentrok menggunakan senjata tajam diantara dua massa. Hingga pada tahun 2021 tiga masyarakat yang menolak tambang harus dihadapkan ke meja hijau dan mendapatkan hukuman berupa enam bulan masa tahanan kota.⁸

Konflik yang berlarut-larut mengakibatkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di Sungai Bila. Dampak tersebut berasal dari aktivitas tambang yang menyebabkan hilangnya lima nyawa masyarakat di Kecamatan Pitu Riase, hilangnya lahan perkebunan milik masyarakat, rusaknya jalan, terancamnya pemukiman masyarakat, terganggunya kesehatan masyarakat akibat terpapar polusi, dan kerusakan lingkungan yang berat terjadi di Sungai Bila. Kerugian – kerugian ini semakin menguatkan penolakan dari masyarakat.

⁸ <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

Penolakan masyarakat berkembang bukan hanya sekedar menuntut ganti rugi kepada penambang. Penolakan masyarakat berubah menjadi pemberhentian seluruh aktivitas tambang demi menyelamatkan kelestarian Sungai Bila. Mengingat pentingnya fungsi Sungai Bila bagi kehidupan masyarakat baik sebagai sumber air atau sumber irigasi pertanian mengairi 9.747 hektare sawah tidak hanya di Kabupaten Sidenreng Rappang hingga ke Kabupaten Wajo.⁹ Penolakan masyarakat yang cenderung terhadap isu penyelamatan lingkungan menggambarkan bahwa konflik tentang tambang galian C di Sungai Bila berada dalam ranah pengelolaan sumber daya alam.

Sumber daya alam seringkali diperebutkan oleh pihak – pihak berkepentingan sehingga terwujudnya konflik. Menurut Alao (2007) Sumber daya alam mempunyai ciri – ciri yang berpotensi untuk melahirkan konflik Pertama, lingkungan memiliki fungsi intangibility, yaitu lingkungan tidak mudah dikuantifikasi dalam bentuk moneter. Kedua, lingkungan merupakan barang publik (*common property*). Ketiga, eksternalitas negatif, yaitu bahwa dampak kerusakan lingkungan akan menimpa orang lain dan bukan pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak tersebut.¹⁰

Kegagalan penyelesaian konflik seringkali terjadi akibat kesalahan memahami konflik yang melibatkan aspek pengelolaan sumber daya alam. Tidak jarang penyelesaian konflik hanya menyelesaikan aspek - aspek

⁹ <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

¹⁰ <https://walhisulsel.or.id/2175-kasus-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-ilegal-di-sungai-bila-kecamatan-pitu-riase-kabupaten-sidrap/>

teknis semata, seperti reklamasi ataupun reboisasi yang hanya fokus kepada perbaikan lingkungan. Sementara akar penyebab tidak terjangkau sehingga solusi yang bersifat teknis tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pendekatan ekologi politik hadir untuk menjelaskan fenomena sosial yaitu konflik berkaitan dengan degradasi lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut Ryant and Bailey ekologi politik berusaha untuk menggeledah konteks politik, sosial, ekonomi, dan budaya terhadap isu degradasi lingkungan dan marginalisasi masyarakat terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan mengenai degradasi lingkungan perlu menyelesaikan akar permasalahan terlebih dahulu yaitu dari segi aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya dari masyarakat itu sendiri. Dalam konteks konflik pengelolaan sumber daya alam, pendekatan ekologi politik hadir untuk memahami kerusakan lingkungan sebagai penyebab konflik pada dasarnya bermuara pada aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada kawasan tersebut.

Aspek politik menjadi faktor utama penyebab lahirnya konflik pengelolaan sumber daya alam menurut pendekatan ekologi politik. Faktor kebijakan dan kepentingan aktor - aktor menjadi pusat kajian untuk memahami penyebab dan penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya alam. Dengan kata lain, secara metodologis itu tidak terbatas hanya sekedar kelembagaan dan aturan-aturan normatif yang diperhitungkan, tetapi juga tiap - tiap perilaku dipertanyakan dalam sudut pandang ekonomi

- politik.¹¹ Berdasarkan pada penjelasan tersebut, pendekatan ekologi politik akan menjadi acuan untuk menganalisa konflik pengelolaan sumber daya alam, khususnya konflik tambang galian C di Sungai Bila.

Kesadaran akan pentingnya studi pemetaan konflik pengelolaan sumber daya alam dalam rangka untuk memperluas sudut pandang pemahaman serta upaya untuk menemukan solusi yang tepat terhadap konflik yang berlarut – larut, sehingga penulis mengangkat judul “**Konflik Tambang Galian C Sungai Bila Di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses konflik tambang galian C yang terjadi antara masyarakat dan penambang di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bagaimana pemetaan konflik yang tambang galian antara masyarakat dan penambang C di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.

¹¹ Oekan S, Abdoellah. 2020. Dari Ekologi Manusia Ke Ekologi Politik, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses konflik tambang galian C yang terjadi antara masyarakat dan penambang di Sungai Bila Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Medeskripsikan dan menganalisis pemetaan konflik tambang galian C yang terjadi antara masyarakat dan penambang di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ialah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi rujukan ilmiah mengenai konflik tambang galian C yang terjadi di Indonesia.
 - b. Mengembangkan keilmuan ilmu politik khususnya kajian konflik pengelolaan sumber daya alam.

2. Manfaat Praktis

- Memberikan informasi dan pembelajaran bagi masyarakat luas mengenai konflik tambang galian C di Indonesia.
- Menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait pertambangan, khususnya tambang galian C di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bagian Ini penulis menguraikan konsep dan teori yang mendasari penelitian ini sehingga menjadi landasan penulis memahami tema penelitian Penelitian tentang konflik tambang galian C Sungai Bila di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang dibangun melalui pendekatan ekologi politik serta menggunakan teori konflik dan teori konflik lingkungan dan Sumber Daya Alam. Penulis juga memaparkan hasil penelitian yang relevan terkait tema penelitian dan kerangka pemikiran yang penulis gunakan dalam metode ini.

2.1 Pendekatan Ekologi Politik

Ekologi politik sebagai sebuah pendekatan, memiliki dua pengertian umum yaitu (1) ekologi politik sebagai suatu (studi akademik maupun gerakan) politik yang prihatin terhadap persoalan (kerusakan) lingkungan, dan (2) ekologi politik sebagai pendekatan dalam studi ekologi manusia yang melibatkan analisis ekonomi-politik terhadap proses atau gejala-gejala ekologis.¹² Sementara itu Robbins telah mencoba mengidentifikasi empat tesis atau pendekatan dalam ekologi politik, yaitu :

1. Degradasi dan marginalisasi. Isu perubahan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi yang berlebihan yang kemudian menyebabkan kemiskinan.

¹² Satria, Arif. 2002. Ekologi Politik Nelayan. Yogyakarta: PT Lkis. Hal 65

2. Konflik lingkungan, isu akses lingkungan yaitu adanya kelangkaan sumber daya akibat pemanfaatan negara, swasta, elit sosial, yang kemudian mempercepat konflik antar kelompok (gender, kelas, maupun etnik).
3. Konservasi dan kontrol. Konflik yang bersumber dari masalah konservasi, yang disebabkan tercabutnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya serta diabaikannya mata pencaharian dan perlindungan lingkungan.
4. Identitas lingkungan dan Gerakan sosial. Perjuangan sosial politik biasanya terkait dengan upaya mempertahankan mata pencaharian dan perlindungan lingkungan.

Ekologi politik bersumber dari dari dua pendekatan yaitu pendekatan aktor dan pendekatan kritis. Pendekatan berpusat pada pelaku (*Actor Oriented-AO*) yang selama ini digunakan oleh Ryant and Bailey melalui buku *Third World Political Ecology* (2001). Pendekatan ini berpijak pada konsep *political environment* yang memiliki asumsi bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi dimana masalah itu muncul. Ada lima aktor yang disorot Bryant and Bailey (2001) yaitu negara, pengusaha, Lembaga multilateral, NGO/LSM, dan aktor akar rumput (*Grass Root*). Negara memiliki dua fungsi sekaligus, baik sebagai aktor pengguna maupun pelindung sumberdaya alam, karenanya negara juga sering mengalami konflik kepentingan. Namun secara teoritis, banyak kritik terhadap eksistensi negara ini.

Pertama, bahwa negara mempersulit upaya memecahkan masalah lingkungan global, karena negara-negara seringkali mengorbankan lingkungan untuk mengejar pembangunan ekonomi.¹³

Fakta empiris tidaklah terbukti bahwa antara kapitalisme dan negara selalu sejalan. Banyak konflik terjadi antara keduanya, seperti adanya kebijakan negara yang membatasi eksploitasi untuk jangka panjang, sementara pihak pengusaha menginginkan yang sebaliknya. Sementara itu aktor akar rumput merupakan pihak yang terlemah dalam *politized environment*. Aktor ini hampir selalu mengalami proses marginalisasi dan rentan terhadap berbagai bentuk degradasi lingkungan. Hal ini terjadi aktor-aktor lain seperti negara, pengusaha memiliki kekuatan politik yang lebih besar dan mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam.¹⁴

Menurut Eric Wolf (Cole&Wolf 1999) secara metodologis itu tidak terbatas hanya sekedar kelembagaan dan aturan - aturan normatif yang diperhitungkan, tetapi juga tiap-tiap perilaku yang dipertanyakan dalam sudut pandang ekonomi-politik. Oleh karena itu, ekonomi-politik dalam pendekatan ekologi politik menjadi sangat penting sebagai acuan untuk menganalisa bentuk dan sifat dari masing-masing kepentingan untuk menjelaskan konflik pengelolaan sumber daya alam¹⁵

¹³ Satria, Arif. 2002. Ekologi Politik Nelayan. Yogyakarta: PT Lkis. Hal 87-88

¹⁴ Ibid hal 89-91

¹⁵ Abdoellah, Oekan S. 2020. Dari Ekologi Manusia Ke Ekologi Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 115

Pendekatan kritis dari ekologi politik juga memfokuskan pada masalah *domination of nature* yang terkait kajian kapitalisme sebagai penyebab utama degradasi lingkungan. Pendekatan ini bersifat pasca-strukturalis untuk melengkapi pendekatan strukturalis, yang mana strukturalis melihat kebijakan negara yang represif yang berdampak pada masyarakat lokal dan lingkungan. Sementara pendekatan pasca-strukturalis lebih menekankan pada pengaruh sejarah dan budaya terhadap evolusi konsep perubahan dan degradasi lingkungan sebagai kekuatan linguistik dan politik (Forsyth 2003 :8).¹⁶

Konsep ekologi politik berbeda dengan konsep politik lingkungan. Bryant dan Bailey (1997) menjelaskan bahwa ekologi politik berfokus pada penjelasan politik terhadap degradasi dan perubahan lingkungan, ekologi politik melihat bagaimana kekuatan ekonomi politik dapat memengaruhi perubahan lingkungan. Sementara itu, politik lingkungan merupakan bidang kajian dalam ilmu politik terhadap masalah-masalah lingkungan, seperti dampak isu lingkungan terhadap proses politik formal serta peran negara dalam pengelolaan lingkungan. Kajian politik lingkungan dianggap lebih teknosentris dibanding ekosentris.

2.2 Teori Konflik Lingkungan dan Sumber Daya Alam.

Sumber daya alam seringkali diperebutkan oleh pihak-pihak berkepentingan sehingga terwujudnya konflik. Perebutan sumber daya

¹⁶ Satria, Arif. 2002. Ekologi Politik Nelayan. Yogyakarta: PT Lkis. Hal 94-95

alam menjadi pertarungan di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini terjadi karena lingkungan memiliki ciri-ciri yang berpotensi memicu konflik. Pertama, lingkungan memiliki fungsi intangibility, yaitu lingkungan tidak mudah dikuantifikasi dalam bentuk moneter. Kedua, lingkungan merupakan barang publik (*common property*). Ketiga, eksternalitas negatif, yaitu bahwa dampak kerusakan lingkungan akan menimpa orang lain dan bukan pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak tersebut.

Keempat, sumberdaya alam digunakan oleh warga di dalam cara-cara yang didefinisikan secara simbolik. Lahan, hutan air bukan hanya sumberdaya, tetapi juga bagian dari cara hidup atau identitas etnik. Keenam, sumber daya alam adalah objek hak di mana terjadi konflik apabila ada praktek penghilangan pengakuan (hak) masyarakat adat dan lokal terhadap tanah dan kekayaan alam yang menyertainya, yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, baik badan-badan pemerintah maupun swasta. Bagi masyarakat adat dan lokal, praktek-praktek penghilangan hak itu merupakan sesuatu yang akan mengancam keberlanjutan hidup mereka.¹⁷

Menurut Alao (2007), ada tiga cara untuk menghubungkan sumber daya alam dengan konflik, yaitu sebagai penyebab konflik, sebagai faktor yang memperpanjang konflik, dan sebagai sarana untuk mengatasi konflik. Sebagai penyebab konflik, ada tiga hal yang saling berhubungan. Pertama,

¹⁷ Cahyati, Devy Dhian. 2014. Konflik Agraria Di Urut Sewu : Pendekatan Ekologi Politik. STPN Pers. Hal 35-36

ketersediaan secara kuantitas dan kualitas. Hal ini fokus pada tingkat dan kualitas sumber daya alam serta permintaan yang seharusnya dipenuhi. Sebagian besar konflik terjadi karena kelangkaan sumber daya alam. Kedua, perpolitikan, pengelolaan, dan pengendalian yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya alam dikelola oleh negara dan beberapa masalah lain yang menyebabkan konflik. Ketiga, kompleksitas proses ekstraksi yang merupakan metode di mana sumber daya alam diperlakukan untuk kepentingan manusia. Konsekuensi dari kegiatan ekstraksi telah mendapatkan perhatian dari ornop lokal dan internasional.¹⁸

Demi memahami lebih mendalam terkait faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pengelolaan sumber daya alam, maka dihadirkan beberapa teori yang relevan untuk dijadikan sebagai latar pengetahuan dalam memahami kondisi empirik konflik sumberdaya dan lingkungan di Indonesia.

1. Teori Ekosentris dan Antroposentris.

Presepsi mendasar sering menjadi penyebab terjadinya konflik sumber daya alam yaitu pertentangan antara pola pikir Antroposentris dan Ekosentris. Antroposentris menempatkan manusia sebagai subyek hidup terpisah dari lingkungan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia dipandang sebagai puncak pusat kehidupan sehingga bisa melakukan apapun untuk kepentingannya.

¹⁸ Alao, Abiodun. 2007. *Natural Resources and Conlict in Africa: The Tragedy of Endowment*. New York: University of Rochester Press. Hal 47

Sebagai bentuk penolakan dari sifat dan sikap antroposentris, munculah sikap ekosentris. yaitu sikap yang mendudukan atau memposisikan aspek kehidupan baik biotik maupun abiotik sebagai bagian yang satu dalam ekosistem. Pola pikir ekosentris sebagai suatu paradigma yang beretika lingkungan secara holistik. Sehingga kenderungan pola pikir dalam Antroposentris dalam mengelola sumber daya alam menyebabkan terjadinya relasi sepihak yang didominasi oleh manusia. Hal ini kemudian memunculkan konsekuensi berupa model pengelolaan sumberdaya yang cenderung bersifat eksploitatif dan hanya berorientasi pada profit yang menyebabkan kerusakan serta kelangkaan terhadap sumber daya alam.¹⁹

2. Teori Ketamakan (*The Greedy Theory*).

Kerakusan dan ketamakan merupakan perilaku yang sering tercermin dalam hubungan manusia dengan alam, maupun manusia dengan manusia lainnya. Konflik lingkungan yang ditimbulkan dari penguasaan sumberdaya alam dipicu oleh nafsu tamak dan rakus, yang berakibat pada diskriminasi, ketidakadilan, dan marjinalisasi kepentingan masyarakat lain (Billon, 2001; Porto, 2002).

Eksplorasi sumberdaya tersebut mengakibatkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan sehingga menurunkan daya hidup masyarakat yang lain. Keuntungannya jelas telah dinikmati oleh para konglomerat dan pengusaha yang bekerjasama dalam mata rantai tersebut, tetapi kerugian

¹⁹ Pratiwi, Andi Mishabul. 2021. Narasi Perempuan dan Interseksionalitas : Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Odise Publishing. Hal 67-69

jelas-jelas sangat dirasakan oleh masyarakat setempat. Bahkan para pekerja pendatang yang semula turut menikmati tetesan ekonomi, akhirnya juga harus menanggung kerugian akibat munculnya konflik di tingkat bawah. Kebijakan lingkungan yang dikembangkan berupa pemberian kompensasi misalnya dengan program bina desa, reklamasi akan meredam konflik dalam jangka waktu pendek, namun tetap tidak menyelesaikan konflik.²⁰

3. Teori Kelangkaan (*Deprivation and Scarcity*).

Menurut para penganut teori *Scarcce Resource Wars* bahwa seseorang, sekelompok orang atau bangsa akan berebut dan bahkan berkelahi atau berperang untuk mempertahankan dan mengamankan akses dan kontrol atas sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau survival; Semakin langka sumberdaya, semakin dasyhat perebutannya (Billon, 2001; Jones, 1998; Porto, 2002).

Kelangkaan berarti kesenjangan yang tak dapat lagi ditoleransi atau diterima antara apa yang diinginkan dan apa yang dapat diraih. Kelangkaan ini dalam kurun waktu tertentu menyebabkan orang atau kelompok orang mengalami kesulitan dan frustrasi, sehingga dapat memicu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau melanggar hak orang. Ketika orang harus antri untuk mendapatkan sesuatu, maka berarti masih ada aturan yang

²⁰ Fink, C.F. 1968. Some Conceptual Difficulties in the Theory of Sosial Conflict. The Journal of Conflict Resolution, Special Review Issue (December, 1968) 412-460.

dapat mengatur hak orang yang datang lebih dahulu untuk memperoleh kesempatan yang pertama, *first come, first serve*.²¹

4. Teori Marginilisasi

Konsep marginalisasi berkenaan dengan kedudukan sosial golongan – golongan tertentu dalam komunitas secara struktural (Blaike & Brookfield 1987). Golongan atau kelompok sosial marginal adalah kategori orang – orang yang secara ekonomi dan paling lemah secara politik. Dikaitkan dengan soal sumber daya alam yang aksesnya senantiasa diperantarai oleh berbagai bentuk institusi sosial, kelompok marginal bisa diartikan sebagai kategori orang-orang yang memiliki akses paling terbatas terhadap sumber daya, pengelolaan, dan manfaat ekonominya.²²

2.3 Teori Konflik

Konflik secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “*Con*” yang berarti bersama dan “*Fligere*” yang *berate* benturan atau tabrakan. Menurut Webster (1966), istilah “conflict” di dalam Bahasa aslinya berarti suatu “perkalihan, peperangan, atau perjuangan”. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya “ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain – lain.”²³

²¹ Fink, C.F. 1968. Some Conceptual Difficulties in the Theory of Sosial Conflict. The Journal of Conflict Resolution, Special Review Issue (December, 1968) 412-460.

²² Abdoellah, Oekan S. 2020. Dari Ekologi Manusia Ke Ekologi Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 123-125

²³ Pruitt, D & Jeffery, R. (2009). Teori konflik sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pruitt, D.G. (2009). Escalation and de-escalation in asymmetric conflict. Hal 13

Fisher, menuturkan bahawa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok), yang memiliki atau merasa memiliki sasaran - sasaran yang tidak sejalan.²⁴ Konflik dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya yang bertujuan tidak hanya untuk mencapai keuntungan tetapi untuk menundukkan saingannya. Konflik adalah kenyataan hidup tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik muncul akibat ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang yang menimbulkan diskriminasi.

Karl Marx mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Potensi-potensi konflik terjadi dalam bidang pekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi, prestise atau status dan kekuasaan politik. Dalam hal tentang kelas sosial, Karl Marx menitik beratkan pada adanya dua kelas yang senantiasa bertikai antara kelompok kapitalis dan kelompok proletar.²⁵

Kekuatan modal atau ekonomi yang dimiliki pihak kapitalis akan cenderung menghadirkan hubungan diskriminasi terhadap kaum proletar.

²⁴ Fisher, Simon et All.2001.Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk bertindak (Bahasa Indonesia).The British Council. Indonesia.Jakarta. Hal 34

²⁵ Suseno, F. M. (2016). Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 34

Kaum proletar yang tertekan akan membentuk sebuah kelompok untuk berusaha memenangkan kepentingan – kepentingannya, yang mana hal ini akan terakumulasi dan menciptakan perubahan - perubahan sosial yang di masyarakat. Dalam tinjauan negara dan kekuasaan, Karl Marx mempertanyakan posisi pemerintah yang dinilai lebih cenderung kepada kepentingan ekonomi semata. Oleh karenanya kaum kapitalis memanfaatkan dengan mengincar legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah dari negara, yang mengakibatkan kelompok kapitalis memiliki kekuasaan, dan dalam konteks ini hukum dan pemerintah cenderung lebih banyak berpihak pada kaum kapitalis dibanding proletar.²⁶

Konflik berubah setiap saat, melalui berbagai aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini penting diketahui untuk membantu menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik (Fisher et al., 2001). Analisis dasar tahapan konflik terdiri dari lima tahap, yaitu: ²⁷

1. Prakonflik. Ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.

²⁶ Ibid hal 42

²⁷ Fisher, Simon et All.2001.Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk bertindak (Bahasa Indonesia).The British Council. Indonesia.Jakarta. Hal 43

2. Konfrontasi. Pada tahap ini, konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.
3. Krisis. Tahap ini merupakan puncak konflik, ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan umum cenderung menuduh atau menentang pihak lain.
4. Akibat. Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak ingin menaklukkan pihak lain, satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.
5. Pascakonflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik di tahap ini, maka akan memicu kembali ke pra konflik.

Klasifikasi konflik yaitu berdasarkan latar terjadinya konflik, pihak yang terkait dalam konflik, dan substansi konflik diantaranya adalah konflik

personal dan konflik interpersonal, konflik interes (*Conflict of interest*), konflik realitas dan konflik non realitas, konflik destruktif dan konflik konstruktif, dan konflik menurut bidang kehidupan (Wirawan, 2010: 55). Adapun berdasarkan dari posisi pelaku yang berkonflik, terdapat dua jenis konflik yang dikategorikan sebagai berikut (Wirawan:2010:55-59) : ²⁸

1. Konflik Vertikal

Konflik vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki atau konflik yang terjadi antara elite dan massa (rakyat). Elit yang dimaksud adalah aparat keamanan, pemerintah, ataupun kelompok bisnis. Bentuk dari konflik ini seperti aksi mogok, boikot, unjuk rasa, kerusuhan, anakisme, gerakan separatis terhadap kekuasaan negara, ataupun terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat.

2. Konflik Horizontal

Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Konflik horizontal sejajar dan bertingkat yang terjadi antara komunitas yang satu dan komunitas yang lain. Konflik horizontal merupakan pertentangan antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya (Hadiati, 2007:8). Konflik horizontal ini disebabkan oleh isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Konflik yang ditimbulkan berupa pertikaian antar kelompok,

²⁸ Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 26

anarkisme, tawuran. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik horizontal seperti ideologi politik, faktor ekonomi dan faktor-faktor primordial.

Konflik akan digambarkan persoalan-persoalan sikap, perilaku dan situasi yang ada. Tipe-tipe konflik terdiri atas tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di permukaan (S.N Kartikasari: 2001: Konflik latent sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. Konflik terbuka adalah konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. Ketiga, yaitu konflik dipermukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

Proses konflik membutuhkan teori eskalasi yang bertujuan untuk menunjukkan transformasi atau perubahan konflik di setiap waktu dan tahapan. Proses eskalasi konflik dapat diklasifikasikan menjadi lima bentuk yaitu :

1. *Ringan* → *Berat*. Pada tahap ini konflik biasanya dimulai dengan usaha yang lebih ringan; ingrasiasi (membangun kesan positif), *gamesmanship* (sandiwara), argumentasi persuasif, dan janji.
2. *Kecil* → *Besar*. Ketika konflik bereskalasi, ada kecenderungan bahwa isu – isu yang ada mengalami proliferasi (pengulangan siklus). Juga ada kecenderungan bahwa masing – masing pihak

menjadi semakin terserap di dalam konflik yang terjadi dan bersedia mengarahkan sumber daya seberapa pun guna memenangkannya.

3. *Spesifik* → *Umum*. Di dalam konflik yang bereskalasi, isu – isu spesifik cenderung berubah menjadi isu – isu umum. Hubungan antara kedua belah pihak pun mengalami perpindahan ke arah kemunduran yang bersifat umum.
4. *Berhasil* → *Menang* → *Menyakiti Pihak Lain*. Pada tahap awal dari banyak konflik, semua pihak berusaha sebaik mungkin untuk kepentingannya sendiri, tanpa mempedulikan baik buruknya hasil yang diperoleh oleh orang lain.
5. *Sedikit* → *Banyak*. Konflik yang dimulai dengan agitasi (hasutan) yang dilakukan oleh sedikit peserta sering kali tumbuh menjadi tindakan kolektif, ketika salah satu pihak merasa gagal untuk memenangkannya.²⁹

Menurut Sulistyanto (2006), pemetaan konflik dilakukan dengan mempertemukan berbagai pihak yang berkonflik sehingga dapat dipelajari situasi dengan sudut pandang masing - masing yang berbeda sekaligus mempelajarinya secara bersama. Dalam pemetaan konflik yang perlu dilakukan adalah :

²⁹ Pruitt, Dean G, dkk. 2009. Teori Konflik Sosial. Pustaka Belajar. Hal 143

1. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan secara detail pihak-pihak utama dan pihak-pihak lain yang berkonflik;
2. Korelasi, yaitu menemukan hubungan di antara semua pihak yang berkonflik;
3. Isu, yaitu menemukan isu pokok di antara pihak yang berkonflik, dan menempatkan isu ini sebagai permasalahan yang akan dipecahkan bersama (Sulistyantoi2006:i22).

Pemetaan konflik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan pihak lainnya. Pemetaan konflik bertujuan untuk lebih memahami situasi dengan baik, melihat hubungan berbagai pihak secara jelas, mengevaluasi hal-hal yang telah dilakukan (Fisher 2008: 22). Pemetaan konflik pada dasarnya dipakai untuk mencapai tujuan: memahami situasi dengan baik, melihat hubungan berbagai pihak secara lebih jelas, menjelaskan dimana letak kekuasaan; melihat para sekutu atau posisi sekutu yang paling tepat, mengidentifikasi mulainya intervensi atau aksi, dan evaluasi apa yang sudah dilakukan (Fisher 2000: 22-23).³⁰

2.4 Tambang Galian C

Aktivitas pertambangan merupakan salah satu aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di bumi. Pertambangan adalah kegiatan teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri

³⁰ Fisher, Simon et All.2001.Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk bertindak (Bahasa Indonesia).The British Council. Indonesia.Jakarta. Hal 22-23

pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran. Pertambangan dengan arti lain yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusaha mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian).³¹

Menurut Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Bahan tambang galian golongan A (bahan galian strategis)
Bahan tambang galian golongan A, adalah bahan tambang galian berupa minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
2. Bahan tambang galian golongan B Merupakan bahan tambang berupa besi, mangan, molboden, khrom, wolfram, vanadium, titan, dan bahan galian vital lainnya.
3. Bahan tambang galian golongan C Bahan tambang galian golongan C, merupakan bahan galian tambang berupa pospat,

³¹ Satria, Arif. 2002. Ekologi Politik Nelayan. Yogyakarta: PT Lkis. Hal 94-95

nitrat, halite, asbes, talk, mika, andesit, pasir dan bahan galian lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi bahan galian golongan A atau golongan B.

Penggunaan kata bahan galian golongan C yang sebelumnya telah diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 silam tersebut telah diubah berdasarkan UU No 3 Tahun 2020, menjadi 'batuan', sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sebetulnya tidak relevan lagi karna sudah secara khusus disebut “batuan”, namun masyarakat sudah terlanjur akrab dengan sebutan “Galian C”. Dalam UU No 3 Tahun 2020, galian C masuk dalam kategori pertambangan mineral. Dalam penjelasan yang lebih sederhana “Galian C” adalah bahan tambang yang lumrah digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi seperti rumah, dan swasta maupun pemerintah seperti pembangunan jalan dan jembatan.

Dalam Pasal 8A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan. Ketujuh asas itu meliputi :

1. Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan pertambangan dapat memberikan kegunaan bagi masyarakat banyak.
2. Asas keadilan merupakan asaa dalam pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan di mana di dalam pemanfaatan itu

harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak.

3. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin.
4. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalah asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan, bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak dan pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar.
5. Asas partisipatif merupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan, tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat terutama masyarakat yang ada di lingkaran tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang.
6. Asas transparansi yaitu asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan harus dilakukan secara terbuka.
7. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pertambangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
8. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha

pertambahan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa datang.

2.5 Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan ide baru untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan membuat menjadi ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum dipublikasi. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini:

1. Penelitian yang berjudul: **Konflik Agraria di Urut Sewu Pendekatan Ekologi Politik oleh Devy Dhian Cahyati**

Penelitian ini memberikan gambaran yang hidup mengenai dinamika relasi aktor dan kepentingannya pada berbagai arena terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. kemampuannya untuk membahas pertali. Penulis buku ini secara bernas menggambarkan bagaimana perbedaan sekaligus pertemuan kepentingan antar-aktor bisnis, politik, dan militer pada akhirnya berujung pada kerusakan lingkungan dan penghilangan hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam. an bisnis dan politik dalam kebijakan dan praktik ekstraksi sumber daya alam.

Penelitian ini juga mampu membongkar jejaring aktor menjadikan analisisnya lebih hidup. Analisis ekologi-politik mampu menggambarkan

bagaimana kepentingan berbeda, disatukan, dipertentangkan di antara berbagai aktor; bagaimana kebijakan dan perizinan menjadi arena melihat hubungan kepentingan; bagaimana aksi-reaksi di antara para aktor yang berseberangan terwujud; secara khusus bagaimana penguatan perlawanan rakyat dan organisasi masyarakat sipil mendorong konsolidasi di antara aktor bisnis, politik, dan militer yang menguasai dan memberikan kemudahan pada penguasaan tanah dan bahan tambang pasir besi di Urut sewu. Konflik sumber daya alam juga penting dipahami sebagai akibat dari pengkhianatan negara pada rakyat. Pada berbagai studi lainnya, termasuk yang saya lakukan, didapat bahwa di masa lampau, rakyat dengan segala kesukarelaan menyerahkan tanahnya kepada negara untuk kepentingan umum, seperti untuk penyelamatan lingkungan, untuk pembangunan infrastruktur.

Analisis terhadap perusahaan, sebagai salah satu aktor penting dalam konflik sumber daya alam, perlu memfokuskan pada aliran modal yang terjadi. Terlalu sederhana melihat perusahaan hanya dari aktivitas dan badan hukumnya. Di balik itu, kekuatan dahsyat yang bekerja adalah modal. Siapa pemegang saham, bagaimana jejaring pemodal saling bertukar saham, dan bagaimana pergerakan saham transnasional menjadi faktor penting lainnya. Badan hukum dapat diikat pada kewarganegaraan, tetapi uang tidak pernah mempunyai

kewarganegaraan. Di sinilah kita melihat bahwa Urut sewu harus dipandang sebagai titik yang terhubung dengan kapitalisme global.

Konflik pemanfaatan sumber daya alam terjadi dan bereskalasi akibat aktor dan faktor yang diungkapkan dalam buku ini, maka penyelesaiannya memerlukan cara - cara baru; tidak semata-mata penyelesaian hukum ataupun penyelesaian yang sifatnya ad hoc. Tantangan terbesarnya adalah menciptakan penyelesaian konflik yang mampu memulihkan hak masyarakat dan restorasi lingkungan, memperbaiki kebijakan, meninjau ulang izin, hak atas tanah dan berbagai bentuk penguasaan tanah oleh instansi pemerintah dan militer, dan memastikan tata kelola yang baik dijalankan.

2. Penelitian yang berjudul: **Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik Oleh Herdis Herdiansyah.**

Penelitian memfokuskan kepada bagaimana resolusi dapat dihadirkan untuk mengelolah konflik sumber daya alam. Peran negara, masyarakat, dan pasar dalam pengelolaan sumber daya alam terbarukan merupakan model triangulasi yang saling terkait. Relasi ini sangat dinamis karena jika negara berperan dominan, maka negara mampu menekan gerak korporasi dan komunitas sehingga terjadi relasi otoriter. Jika korporasi lebih kuat, maka korporasi mampu melakukan kontrol terhadap pemerintah dan masyarakat sehingga konsekuensinya adalah eksploitasi sumber daya alam. Jika kondisi komunitas sangat

kuat, maka komunitas memiliki kuasa lebih besar terhadap pemerintah dan masyarakat sehingga muncul anarkisme, atau masyarakat tanpa negara. Masing-masing relasi ini memiliki kepentingan, daya juang, dan terjebak pada perilaku merusak.

Pendekatan ekologi politik memahami bahwa keseimbangan yang hierarkis dibutuhkan dari masing-masing peran. Negara memayungi pasar dan masyarakat, demikian juga masyarakat dan pasar sebagai bagian dari sistem yang diatur negara, sehingga sesuai dengan pendekatan ekologi politik, di mana masalah tingkat perbedaan kepentingan yang terjadi justru meningkatkan konflik itu sendiri. Manajemen sumber daya alam di masa depan harus secara jelas melibatkan hak pembagian sumber daya alam dan tanggung jawab pengelolaan di dalamnya.

3. Penelitian berjudul: **Tipologi Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi oleh Tim Penulis Ronggo Bayu Widodo, Hayu Wibawa, Wahyu Faturrahman R, Budi Susetyo.**

Tujuan dari perumusan tipologi konflik tenurial di kawasan konservasi ini adalah mengelompokkan atau mengklasifikasikan konflik-konflik yang terjadi menjadi beberapa tipe dan jenis konflik tenurial berdasarkan aktor/pelaku, lokasi, waktu, luas lahan, tipe pengelolaan/penggunaan/penguasaan lahan dan zona/blok pengelolaan kawasan konservasi. Berdasarkan klasifikasi konflik yang telah

dikelompokkan, akan dirumuskan arahan penanganan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam penilaian tipologi konflik, dilakukan pengumpulan informasi yang lengkap untuk memastikan penanganan dalam setiap konflik yang terjadi, bisa ditentukan dengan tepat. Beberapa tahap awal dalam pengumpulan data konflik, diantaranya Pemetaan sosial (social mapping), Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping), dan Tipologi Konflik Tenurial. Sebagai solusi penyelesaian konflik, mekanisme penyelesaian konflik tenurial dilakukan dengan menggunakan pendekatan *plan* (rencanakan), *do* (kerjakan), *check* (cek), dan *act* (tindak lanjuti).

Penelitian ini mendeskripsikan pada Konflik tenurial yang terjadi di kawasan konservasi memiliki beberapa bentuk dan tipe dengan skala dan intensitas yang berbeda-beda. Upaya penyelesaian konflik tenurial harus disesuaikan dengan bentuk, tipe, skala dan intensitasnya, serta menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat sehingga hak asasi manusianya tetap terjamin dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan fungsi kawasan konservasi. Pendekatan penyelesaian konflik tenurial di kawasan konservasi salah satunya dilakukan dengan menyajikan gambaran secara jelas masyarakat dan aktivitasnya di dalam kawasan konservasi dan mengelompokkannya ke dalam tipologi - tipologi konflik sehingga upaya pendekatan

penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan tipologinya masing - masing.

4. Penelitian berjudul: **Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya dalam Era Otonomi Daerah dan Transisi Masyarakat. Oleh: M. Baiquni & R. Rijanta.**

Kebijakan otonomi daerah yang diluncurkan di tengah krisis multidimensi dan transisi masyarakat madani, membawa sejumlah implikasi dan komplikasi dalam pelaksanaannya di berbagai tingkatan. Reformasi rezim dan perubahan kebijakan secara mendadak dari sentralisasi ke desentralisasi, berlangsung dalam situasi ketidakpastian yang diwarnai krisis ekonomi, konflik sosial dan gejolak politik. Sementara itu ketegangan, perselisihan, konflik, dan bahkan konflik dengan kekerasan masih berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia.

Pemahaman teoretis dan pemaknaan empiris terhadap fenomena konflik sosial dan spatial kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya dan lingkungan, dipetakan dan didiskusikan dalam tulisan ini. Tulisan ini dimulai dengan analisis perubahan peradaban yang cepat dan transisi masyarakat, pemetaan teori konflik, kemudian menitik pada persoalan konflik lingkungan dan sumberdaya alam di Indonesia dengan menganalisis data empirik mengenai berbagai kasus konflik antardaerah dan antarsektor serta stakeholders. Diskusi diakhiri dengan agenda riset untuk memahami persoalan dan resolusi konflik.

Teori - teori tentang konflik berlatar sumberdaya dan lingkungan hidup memberikan gambaran tentang dominasi kekuatan-kekuatan utama dunia dalam eksploitasi sumberdaya dan lingkungan secara global. Dalam konstelasi ini negara - negara maju memiliki posisi dominan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar, sedangkan negara-negara sedang berkembang cenderung berada pada posisi marginal. Selain relevan menjelaskan berbagai konflik pada lingkup global, beragam teori tentang konflik sumberdaya dan lingkungan yang telah dibahas dalam artikel ini ternyata memiliki relevansinya masing - masing dalam menjelaskan terjadinya berbagai konflik lingkungan dan sumberdaya pada tingkatan yang lebih kecil.

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian

	Penulis	Devy Dhian Cahyati	Herdis Herdiansyah	Ronggo Bayu Widodo, dkk	M. Baiquni dan R. Rijanta
Judul	Konflik Tambang Galian C di Sungai Bila.	Konflik Agraria di Urut Sewu Pendekatan Ekologi Politik	Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan Dalam Pendekatan Ekologi Politik	Tipologi Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	Konflik Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya dalam Era Otonomi Daerah dan Transisi Masyarakat
Teori	<ul style="list-style-type: none"> - Teori Konflik, - Teori Konflik Lingkungan dan Sumber Daya Alam - Pendekatan Ekologi Politik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Ekologi Politik - Teori Relasi Kuasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan Ekologi Politik - Paradigma penyelesaian konflik lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Social Mapping</i> - <i>Stakeholder Mapping</i> - Tipologi konflik Tenurial 	<ul style="list-style-type: none"> - Teori Konflik Lingkungan dan sumber daya alam - Teori Ketamakan - Teori NMBY - Teori <i>Profit Taking</i>
Tujuan	Untuk mengetahui bagaimana proses dan pemetaan konflik tambang galian C di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase,	Menganalisis relasi dari aktor – aktor yang terlibat konflik dalam Analisi ekonomi politik	Menganalisis relasi dari aktor – aktor dalam pengelolaan sumber daya alam perspektif ekologi politik	Mengelompokkan konflik menjadi beberapa tipe dan jenis konflik tenurial berdasarkan aktor, lokasi, waktu, luas, lahan, tipe pengelolaan dai kawasan konservasi	Memahami konflik dalam pengelolaan sumber daya alan dan pemaknaan empirik atas konflit perebutan sumber daya alam
<p>Aspek pembaharuan penelitian “Konflik Tambang Galian C Sungai Bila di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang” terletak pada bagaimana konflik pengelolaan sumber daya alam dianalisis dengan menggunakan teori konflik sosial dengan menggunakan pendekatan ekologi politik sehingga menghasilkan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis eskalasi konflik secara sosial serta kepentingan – kepentingan ekonomi politik dari aktor – aktor yang terlibat dalam konflik tambang galian C. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk mengkolaborasikan kajian konflik sosial dengan pendekatan ekologi politik untuk menemukan akar permasalahan dan solusi dari konflik pengelolaan sumber daya alam di Sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase.</p>					

2.6 Kerangka Pemikiran

Konflik tambang galian C Sungai Blla, Kecamatan Pitu Riase merupakan suatu konflik pengelolaan sumberdaya Alam. Konflik ini melibatkan beberapa aktor yang berkepentingan diantaranya negara, masyarakat adat, (*Non Government Organisation*) NGO dan perusahaan perkebunan. Konflik ini bermula ketika adanya indikasi dari kerusakan dan degradasi lingkungan terhadap daerah aliran sungai yang menyebabkan kekeringan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar sungai.

Teori Konflik pengelolaan sumber daya alam membantu menganalisis konflik tambang pasir dalam hal pengelolaan sumber daya alam dari sudut pandang ilmu politik. Teori ini menitikberatkan terhadap degradasi lingkungan dan marginalitas komunitas masyarakat yang diakibatkan oleh aspek-aspek sosial dan politik baik ditingkat lokal, dan nasional. Aspek sosial politik tersebut digeledah menggunakan pengkajian terhadap aktor-aktor berkepentingan, latar belakang kepentingan terhadap kawasan, resiko konflik terhadap perubahan sosial politik dan politik disuatu negara dan ekonomi politik terhadap sumber daya.

Gambar. 2.1 Skema Kerangka Pikir

